

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan di mana seseorang tidak mampu membeli kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan (Maipita, 2014). Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mencapai tingkat hidup minimum (Kuncoro, 2000). Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik (2024) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah situasi di mana seseorang mengeluarkan uang rata-rata per bulan per orang di bawah batas kemiskinan, yang ditentukan dengan melihat kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.

Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang atau sebuah keluarga tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan barang lain yang penting, sehingga pengeluaran per orang berada di bawah batas yang ditetapkan sebagai garis kemiskinan. Berdasarkan penelitian Nuryitmawan (2016) Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneternya, kemiskinan di Indonesia tidak hanya dilihat dari segi uang, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup yang layak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sugiharti et al., (2022) menyatakan bahwa kemiskinan yang berkepanjangan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural, seperti ukuran keluarga yang besar, sulitnya akses ke layanan keuangan, listrik, dan mobilitas, serta banyaknya pekerjaan yang ada di sektor pertanian di daerah pedesaan. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah yang

rumit, yang tidak hanya menunjukkan kurangnya pendapatan, tetapi juga kurangnya akses pada sumber daya dan kesempatan untuk mendapatkan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.1.1 Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut BPS (2024), kemiskinan pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. **Kemiskinan Absolut.** Kemiskinan absolut adalah keadaan di mana seseorang memiliki penghasilan yang sangat rendah dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini membuat mereka tidak bisa hidup dengan layak. Untuk menentukan kemiskinan mutlak, kita melihat seberapa banyak uang yang dimiliki seseorang dibandingkan dengan jumlah uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat bertahan hidup. Jadi, seseorang dianggap mengalami kemiskinan absolut jika penghasilannya berada di bawah batas kemiskinan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka.
2. **Kemiskinan Relatif.** Kemiskinan relatif dapat dilihat dari sudut ketidakadilan sosial. Ketika seseorang sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar yang paling minimal, tetapi masih sangat rendah jika dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, orang itu dianggap berada dalam kategori miskin relatif. Semakin besar perbedaan pendapatan antara kelompok atas dan kelompok bawah, maka jumlah penduduk yang miskin juga akan semakin tinggi. Jadi, kemiskinan relatif berkaitan erat dengan bagaimana pendapatan didistribusikan.

2.1.1.2 Faktor Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi beberapa faktor utama, baik secara ekonomi, sosial, struktural, dan geografis:

1. Faktor Ekonomi

- a) Tingkat pendapatan yang rendah disebabkan oleh tingginya angka pengangguran serta rendahnya produktivitas dari tenaga kerja.
- b) Akses yang terbatas terhadap modal, pinjaman, dan institusi keuangan yang resmi membuat masyarakat kesulitan dalam mengembangkan usaha yang produktif.
- c) Ketidakseimbangan dalam distribusi aset dan kekayaan, khususnya dalam hal kepemilikan tanah dan kesempatan ekonomi yang tidak merata.

2. Faktor Sosial

- a) Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat menjadi salah satu faktor yang membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan stabil.
- b) Adanya budaya ketergantungan yang masih kuat serta rendahnya dorongan untuk berinovasi atau berwirausaha menyebabkan masyarakat sulit mandiri secara ekonomi.
- c) Keterbatasan akses terhadap fasilitas dan layanan kesehatan berdampak pada menurunnya tingkat produktivitas tenaga kerja serta kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

3. Faktor Geografis

- a) Terpisahnya wilayah terpencil dari pusat kegiatan ekonomi menyebabkan masyarakat di daerah tersebut memiliki akses yang terbatas terhadap pasar, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
- b) Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian menjadikan perekonomian masyarakat rentan terhadap dampak perubahan iklim serta risiko bencana alam.

Menurut Todaro dan Smith (2020), kemiskinan muncul akibat distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi yang tidak seimbang, sedangkan penelitian dari Sugiharti et al., (2022) mengindikasikan bahwa kemiskinan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kurangnya akses terhadap layanan dasar dan lapangan kerja formal. Dengan kata lain, kemiskinan bukan sekadar masalah penghasilan yang rendah, tetapi juga akibat dari sistem sosial-ekonomi yang masih belum inklusif dan adil.

2.1.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi

Teori pembangunan ekonomi memandang pembangunan sebagai proses multidimensional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan, bukan sekadar menaikkan output atau pertumbuhan ekonomi. Pemikiran Nurkse (1953), Lewis (1954), dan Myrdal (1957) menekankan bahwa kemiskinan bersifat struktural akibat rendahnya akumulasi modal, terbatasnya kesempatan kerja produktif, dan ketimpangan regional. Menurut Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, akses pendidikan dan

kesehatan, serta institusi dan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan demikian, pembangunan yang tidak merata cenderung mempertahankan lingkaran kemiskinan, sementara pembangunan yang inklusif mampu mendorong mobilitas ekonomi dan menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

2.1.1.4 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Ragnar Nurkse 1953 dalam (Sriyana, 2021) mengemukakan sebuah teori tentang kemiskinan yang dikenal sebagai teori lingkaran setan kemiskinan. Menurut Nurkse, teori ini menggambarkan serangkaian kekuatan yang saling berinteraksi, sehingga menciptakan tantangan untuk tercapainya pembangunan yang lebih baik dalam suatu negara, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Nurkse menekankan bahwa keterbelakangan dan ketidaksempurnaan di pasar berpengaruh pada rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah berujung pada menurunnya pendapatan yang mengakibatkan penurunan dalam tabungan serta investasi. Minimnya investasi menyebabkan kurangnya modal yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Sukirno (2004), pengangguran merujuk kepada individu yang sudah terdaftar dalam angkatan kerja, yang dengan aktif mencari pekerjaan pada level gaji tertentu, namun tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Pengangguran terdiri dari sekelompok orang atau populasi yang termasuk dalam angkatan kerja dengan usia produktif antara 15 hingga 64 tahun, baik yang sudah memiliki pekerjaan tetapi saat ini tidak bekerja maupun mereka yang masih dalam proses pencarian pekerjaan, yang semuanya dikategorikan sebagai pengangguran.

Untuk dapat mengetahui tingkat pengangguran terbuka maka rumusnya adalah sebagai berikut:

Rumus:

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Keterangan:

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

PP : Jumlah Pengangguran (orang)

PAK : Jumlah Angkatan Kerja (orang)

Apabila nilai TPT tinggi, ini bisa menunjukkan bahwa di wilayah tersebut terdapat sejumlah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur, meskipun mereka tergolong dalam angkatan kerja. Kondisi ini berpotensi menurunkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan.

Dari tahun ke tahun, tingkat pengangguran cenderung mengalami peningkatan. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena salah satu indikator pembangunan yang berhasil adalah kemampuan untuk menanggulangi kemiskinan dan menurunkan pengangguran dengan signifikan. Terutama di zaman globalisasi ini, persaingan di dunia tenaga kerja semakin ketat, terutama akibat pembukaan perdagangan bebas yang memudahkan masuknya tenaga kerja asing yang diperkirakan memiliki kualitas lebih baik (Sari & Soesatyo, 2017).

Penduduk memiliki dua fungsi dalam pembangunan ekonomi; satu sebagai permintaan dan yang lainnya sebagai penawaran. Dalam konteks permintaan, penduduk berperan sebagai konsumen, sedangkan dalam konteks penawaran,

mereka berfungsi sebagai produsen. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk yang cepat tidak selalu menjadi penghalang bagi perkembangan ekonomi jika penduduk tersebut memiliki kemampuan tinggi untuk memproduksi dan menyerap hasil produksi. Ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah penduduk yang tinggi harus diimbangi dengan tingkat pendapatan yang juga tinggi. Maka, tambahan jumlah penduduk dengan level pendapatan rendah tidak memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi (Ilmiryani et al., 2023).

Menurut BPS (2024) pengangguran terbuka terdiri dari:

1. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan.
2. Penduduk yang sedang bersiap untuk memulai bisnis.
3. Penduduk yang merasa tidak ada peluang untuk memperoleh pekerjaan.
4. Penduduk yang merasa tidak memiliki pekerjaan meskipun belum bekerja.

2.1.2.1 Jenis – Jenis Pengangguran

Jenis pengangguran dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yang pertama dilihat dari faktor penyebabnya dan yang kedua dilihat dari karakteristiknya.

Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

a. Pengangguran Friksional

Ini terjadi mayoritas karena faktor pencari kerja. Pada saat tersebut, banyak pemilik usaha yang memberikan gaji tinggi kepada tenaga kerja, sehingga banyak tenaga kerja yang memilih untuk menerima tawaran gaji tinggi itu dan meninggalkan pekerjaan sebelumnya guna mendapatkan pekerjaan baru tersebut.

b. Pengangguran Siklikal

Muncul karena fluktuasi dalam siklus ekonomi, di mana kadang-kadang ada peningkatan permintaan dan di saat lain permintaan menurun. Saat adanya penurunan permintaan, perusahaan dihadapkan pada keputusan untuk mengurangi kebutuhan tenaga kerja, yang mengakibatkan banyak karyawan terkena pemutusan hubungan kerja.

c. Pengangguran Struktural

Terjadi akibat masalah yang berkaitan dengan struktur atau komposisi ekonomi. Perubahan dalam struktur ini memerlukan pergeseran dalam keterampilan yang diperlukan oleh tenaga kerja; jika pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang baru, maka mereka akan mengalami kesulitan.

d. Pengangguran Teknologi

Terjadi akibat kemajuan dalam teknologi dan otomatisasi, yang mengurangi keperluan akan tenaga manusia dalam proses produksi.

Jenis Pengangguran Berdasarkan Karakteristiknya:

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran karena banyaknya lapangan kerja yang tersedia relatif terhadap jumlah tenaga kerja.

b. Pengangguran Tersembunyi

Kondisi di mana tenaga kerja berlebih terlibat dalam aktivitas ekonomi yang mengakibatkan pengangguran.

c. Pengangguran Musiman

Pengangguran yang terjadi akibat adanya perubahan cuaca. Contohnya, pada periode musim hujan, petani penggali karet tidak dapat menyelesaikan tugas mereka, sehingga mereka berada dalam kondisi menganggur.

d. Setengah Menganggur

Tenaga kerja yang hanya beraktivitas antara satu hingga empat jam dalam sehari.

2.1.2.2 Teori Pasar Tenaga Kerja

Teori pasar tenaga kerja menjelaskan interaksi antara penawaran dan permintaan tenaga kerja yang menentukan upah dan tingkat penyerapan. Menurut Lewis (1954) ekonomi terbagi menjadi sektor tradisional berproduktifitas rendah dan sektor modern berproduktifitas tinggi, di mana surplus tenaga kerja di sektor tradisional sering tidak terserap akibat keterbatasan pertumbuhan industri, sehingga menimbulkan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Kondisi ini berdampak pada rendahnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, menegaskan bahwa efisiensi penyerapan tenaga kerja di sektor produktif menjadi faktor penting dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (Lestari, 2023).

2.1.3 Belanja Sosial

Belanja sosial adalah wujud pelaksanaan dari upaya pengembangan sosial di suatu wilayah. Tujuan dari pengembangan sosial adalah untuk mengatasi kemiskinan yang meliputi aspek pendapatan dan pola konsumsi, serta aspek sosial dan lingkungan (Surjono & Peterson, 2010). Tentang Distribusi Pengeluaran

Belanja Bantuan Sosial di Sektor Kementerian Sosial diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019. Memberikan bantuan sosial adalah sebuah langkah untuk mengurangi kesulitan, melindungi, serta mengembalikan keadaan kehidupan mental, fisik, serta sosial, termasuk aspek psikologis dan ekonomi, serta memperkuat kemampuan yang ada pada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang menghadapi tantangan dan kerentanan sosial agar dapat menjalani hidup dengan layak (Fitryani & Haryanto, 2021).

Klasifikasi pengeluaran belanja sosial yang disediakan dalam APBD/APBN yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 dikelompokkan sebagai berikut:

1. Belanja sosial bersifat konsumtif berfungsi sebagai instrumen jaring pengaman sosial yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan dalam kategori ini umumnya disalurkan secara langsung kepada individu atau rumah tangga dalam bentuk uang tunai maupun barang guna membantu pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Belanja sosial produktif memiliki orientasi pada penguatan sektor ekonomi masyarakat. Dana yang dialokasikan dalam bentuk bantuan modal usaha, baik kepada individu maupun kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi, diberikan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, memperluas peluang pendapatan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan sosial.
3. Belanja sosial melalui lembaga pendidikan, kesehatan, dan lembaga sosial lainnya diberikan dalam bentuk bantuan uang, barang, atau jasa yang disalurkan kepada institusi penerima. Tujuannya agar lembaga-lembaga

tersebut dapat menyalurkan kembali bantuan tersebut kepada masyarakat, sehingga mampu mengurangi beban ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

2.1.3.1 Teori Redistribusi Pendapatan

Menurut Teori Redistribusi Pendapatan (Income Redistribution Theory) yang dikembangkan oleh Musgrave (1959) yang menyatakan bahwa fungsi utama pemerintah dalam keuangan publik adalah melakukan redistribusi pendapatan untuk menciptakan pemerataan dan mengurangi kemiskinan. Belanja sosial dipandang sebagai salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang berperan penting untuk menekan ketimpangan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Melalui kebijakan ini, pemerintah melakukan redistribusi sebagian pendapatan nasional kepada kelompok berpenghasilan rendah melalui berbagai program, seperti bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan cara tersebut, belanja sosial berfungsi sebagai sarana *transfer fiskal* yang bertujuan menciptakan pemerataan pendapatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin (Kholiq, 2022).

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan tingkat keseluruhan pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah sebagai hasil dari berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan. Perubahan nilai IPM merefleksikan peningkatan atau penurunan kualitas pembangunan manusia di wilayah tersebut. Dalam kerangka pembangunan manusia, tujuan utama pembangunan adalah

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Untuk mewujudkannya, peningkatan kualitas penduduk dilakukan melalui beberapa dimensi utama, yaitu: dimensi fisik yang menekankan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dimensi intelektual melalui peningkatan mutu pendidikan, dimensi kesejahteraan ekonomi dengan memperkuat daya beli masyarakat, serta dimensi moralitas yang diarahkan pada penguatan keimanan dan ketakwaan individu (Bappeda, 2017).

Menurut UNDP (2020), Pembangunan manusia seharusnya dipahami tidak semata-mata dari sisi material, melainkan juga melalui aspek kesejahteraan sosial, mutu pendidikan, serta derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, IPM cerminan kualitas hidup masyarakat melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, bukan sekadar ukuran kemakmuran ekonomi (Nurcholifah & Ashar, 2024).

2.1.4.1 Tiga Dimensi Utama Dalam Indeks Pembangunan Manusia

1. Kesehatan

Aspek kesehatan diukur menggunakan indikator angka harapan hidup saat lahir, yang menggambarkan tingkat kualitas kesehatan masyarakat serta kemudahan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Indikator ini mencerminkan kondisi risiko kesehatan masyarakat dan ketersediaan layanan pendukung seperti gizi, sanitasi, serta fasilitas kesehatan yang memadai (UNDP, 2020).

2. Pendidikan

Dimensi pendidikan terdiri dari rata-rata tahun sekolah yang dilalui dan

ekspektasi tahun sekolah. Rata-rata tahun sekolah mencerminkan berapa banyak tahun pendidikan yang telah dijalani oleh orang dewasa, sementara ekspektasi tahun sekolah menilai kemungkinan pendidikan bagi anak-anak yang berusia sekolah. Amartya Sen berpendapat bahwa pendidikan memiliki kontribusi yang signifikan dalam memberdayakan masyarakat, membuat individu lebih mandiri, produktif, dan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

3. Standar Hidup Layak

Standar kehidupan dinilai berdasarkan produk nasional bruto (GNI) per orang yang disesuaikan dengan daya beli (Purchasing Power Parity, PPP). Pendapatan ini menunjukkan kemampuan beli individu dan kapasitas mereka untuk memenuhi kebutuhan mendasar, termasuk makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Berdasarkan data World Development Indicators (2018), pendapatan per orang memiliki kaitan langsung dengan kemampuan komunitas dalam mendapatkan pendidikan serta layanan kesehatan yang baik.

2.1.4.2 Fungsi dan Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

IPM bukan sekadar instrumen statistik, melainkan juga alat untuk membandingkan perkembangan antara negara dan kawasan. IPM dapat dipakai untuk mengevaluasi kemampuan suatu negara dalam memberikan kesejahteraan kepada penduduknya (Todaro & Smith, 2012). Melalui IPM, para pengambil keputusan bisa:

1. Menentukan bidang-bidang utama dalam pembangunan seperti kesehatan, pendidikan, atau ekonomi.
2. Mengkaji sejauh mana efisiensi dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Menganalisis kondisi kesejahteraan di berbagai daerah secara objektif, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih setara dan adil.

Meskipun Indeks Pembangunan Manusia dipandang sebagai ukuran yang menyeluruh, banyak penelitian menunjukkan bahwa indeks ini mempunyai batasan signifikan. Klasen (2018) mengungkapkan bahwa IPM tidak dapat menangkap dimensi penting seperti ketidaksetaraan sosial, kebebasan politik, dan kualitas penyediaan pendidikan serta kesehatan, sehingga hasil nilainya sering kali tidak merepresentasikan keadaan pembangunan manusia secara holistik. Dalam pandangan serupa, Naveed (2024) menyatakan bahwa IPM hanya menilai tiga elemen utama pendapatan, pendidikan, dan Kesehatan tanpa memperhitungkan aspek hak-hak dasar dan kualitas layanan, yang membuatnya kurang peka terhadap ketidakadilan dan kualitas kehidupan masyarakat yang sebenarnya.

2.1.4.3 Teori Pembangunan Manusia

Teori Pembangunan Manusia yang diperkenalkan oleh Amartya Sen pada tahun 1980 dan 1999 menegaskan bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa jauh individu memiliki kemampuan untuk menjalani hidup yang mereka anggap berarti. Teori ini fokus pada peningkatan kualitas hidup manusia melalui perluasan akses menuju pendidikan, peningkatan kesehatan, dan perbaikan kondisi ekonomi. Berdasarkan

pemikiran ini, Indeks Pembangunan Manusia diciptakan sebagai alat ukur komposit untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembangunan suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak. Dengan cara ini, IPM mencerminkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, lebih dari sekadar ukuran material (UNDP, 2020).

2.1.5 Jumlah Kredit

Menurut Kasmir (2010), kata kredit berasal dari istilah latin *credere* yang berarti "percaya". Dalam hal ini, kreditor memberikan kepercayaan kepada debitor bahwa uang yang dipinjam akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sedangkan debitor memiliki tanggung jawab untuk memenuhi pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Konsep serupa juga dijelaskan oleh Sirait dan Wahyuni (2020), yang mengatakan bahwa kredit mencerminkan hubungan kepercayaan antara pihak yang meminjamkan uang dan pihak yang menerima pinjaman. Oleh karena itu, inti dari konsep kredit didasarkan pada prinsip kepercayaan (*trust*), di mana keberlanjutannya ditentukan oleh keyakinan pemberi pinjaman terhadap kemampuan dan niat baik penerima kredit untuk mengembalikan uang tepat waktu.

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 mengenai perbankan, dijelaskan bahwa "Kredit adalah penyediaan dana atau instrumen yang setara, berdasarkan persetujuan atau perjanjian pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dan pihak lain yang mengharuskan penerima pinjaman untuk membayar kembali utangnya setelah periode tertentu dengan bunga".

2.1.5.1 Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terdapat dalam proses pemberian suatu fasilitas kredit mencakup berbagai unsur penting yang menjadi dasar terlaksananya hubungan pinjam meminjam antara pihak pemberi dan penerima kredit sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Ini merujuk pada keyakinan pihak yang memberikan kredit bahwa pinjaman yang diberikan akan benar-benar dibayarkan kembali di masa depan. Keyakinan ini diberikan oleh lembaga perbankan, setelah melakukan analisis dan investigasi terhadap klien baik dari sisi internal maupun eksternal.

2. Kesepakatan

Ini adalah adanya perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam. Perjanjian tersebut ditulis dalam bentuk kontrak yang mana setiap pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap pinjaman yang diberikan memiliki periode tertentu, yang mencakup waktu pengembalian pinjaman yang telah disetujui. Periode ini bisa berupa jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

4. Risiko

Terjadinya suatu periode waktu pengembalian dapat mengakibatkan risiko gagal bayar dalam pemberian kredit. Semakin lama jangka waktu kredit, semakin tinggi pula risikonya, dan sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik yang disebabkan oleh kelalaian nasabah maupun yang

akibat faktor lain yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Ini adalah imbalan dari pemberian kredit atau layanan yang dikenal sebagai bunga.

2.1.5.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari profit

Tujuan utama adalah untuk mendapatkan hasil dari penyaluran pinjaman. Keuntungan ini sangat penting untuk keberlangsungan bank. Jika sebuah bank terus-menerus mengalami kerugian, maka kemungkinan besar akan berakhir dengan likuidasi.

2. Mendukung usaha klien

Tujuan lain adalah untuk membantu klien yang memerlukan dana investasi atau modal untuk operasional usaha.

3. Mendukung pemerintah

Bagi pemerintahan, semakin banyak pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan, maka semakin baik untuk memajukan pembangunan di berbagai sektor.

Selain tujuan-tujuan di atas, kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi penggunaan uang

Jika uang hanya disimpan, maka tidak akan menghasilkan manfaat. Dengan pemberian pinjaman, uang tersebut bisa digunakan untuk menghasilkan produk dan layanan oleh penerima pinjaman.

2. Meningkatkan distribusi uang

Dalam konteks ini, uang yang disalurkan akan berbeda antar wilayah, sehingga daerah yang kekurangan dapat menerima tambahan dana dari wilayah lain.

3. Meningkatkan kegunaan barang

Pinjaman dari bank memungkinkan debitur untuk mengubah barang yang tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat.

4. Meningkatkan sirkulasi barang

Pinjaman juga dapat meningkatkan atau memperlancar aliran barang dari satu daerah ke daerah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar meningkat antara wilayah yang berbeda.

5. Sebagai instrumen stabilitas ekonomi

Dengan penyaluran kredit, dapat diargumenkan bahwa ini berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan, akan ada peningkatan jumlah barang yang tersedia bagi masyarakat. Pinjaman juga berfungsi dalam mendukung ekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri, yang akan membawa devisa bagi negara.

6. Untuk memperbaiki distribusi pendapatan

Semakin banyak pinjaman yang diberikan, semakin positif dampaknya, khususnya dalam hal peningkatan pendapatan. Apabila sebuah pinjaman dialokasikan untuk mendirikan pabrik, maka pabrik tersebut pasti memerlukan tenaga kerja, yang juga dapat membantu mengurangi angka pengangguran.

7. Untuk memperkuat hubungan antarpihak negara

Dalam konteks pinjaman luar negeri, fasilitas kredit dapat memperkuat hubungan internasional dan membuka peluang kerja sama lintas sektor, sehingga mendorong perkembangan negara penerima.

2.1.5.3 Teori Financial Deepening

Teori *financial deepening*, yang diperkenalkan oleh McKinnon (1973) dan Shaw (1973), menekankan bahwa peningkatan akses dan volume kredit mencerminkan pendalaman sektor keuangan yang memungkinkan alokasi dana ke aktivitas produktif dilakukan secara lebih efisien. Perluasan akses kredit bagi rumah tangga berpendapatan rendah berpotensi memperkuat kapasitas usaha, mendorong investasi, serta meningkatkan produktivitas, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan pengurangan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, pertumbuhan jumlah kredit dipandang sebagai mekanisme penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan inklusi keuangan (Sarma & Pais, 2011).

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari di atas berbagai kajian empiris sebelumnya yang memberikan dasar teori dan bukti yang mendukung relevansi isu yang dianalisis. Hasil-hasil dari penelitian itu tidak hanya memperkuat pentingnya pelaksanaan studi ini, namun juga memberikan pemahaman tentang kecenderungan interaksi antarvariabel yang diteliti. Oleh karena itu, kajian-kajian sebelumnya menjadi rujukan penting dalam menyusun kerangka konsep dan memperkuat argumen empiris dalam penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Y. Utari dan Agus Sumanto (2024) “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Tahun 2018- 2022”	Variabel y: Kemiskinan Variabel x: TPT Metode: Data Panel	Variabel x: Pertumbuhan Ekonomi Lokasi penelitian: Jawa Timur	TPT berpengaruh positif, dan PDRB tidak mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2018-2022	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 24, No.1 Juli 2024 P-ISSN: 1693- 7600, E-ISSN : 2598-0157
2.	Shafa Riyandini (2024) “Analisis Pengaruh IPM, Upah Minimum, TPT dan Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (2017– 2022)”	Variabel y: Kemiskinan Variabel x: TPT, Bantuan Sosial, IPM Metode: Data Panel	Variabel x: Upah Minimum Lokasi Penelitian: Jawa Timur	IPM dan TPT signifikan (IPM negatif, TPT positif); Upah minimum & bantuan sosial sering tidak signifikan.	Journal of development economics and social studies (2024)

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Irvian Nurcholifah, Khusnul Ashar (2024) “Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia”	Variabel y: Kemiskinan Metode Penelitian: Data Panel	Variabel y: Pertumbuhan Ekonomi Variabel x: - Tingkat Pendidikan - Tingkat Kesehatan - Pengeluaran Perkapita - Pandemi Covid-19 Lokasi Penelitian: Nasional	Kesehatan dan pengeluaran per kapita berpengaruh positif signifikan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh, COVID-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.	Journal of development economics and social studies (2024)
4.	Putri Aulia Husain, Roy Hasiru, Fatmawaty Damiti, Melizubaida Mahmud, Ardiansyah (2025) “Pengaruh Pemanfaatan Program Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Desa Pelita Hijau Kabupaten Bone Bolango”	Variabel y: Kemiskinan Variabel x: Bantuan Sosial	Lokasi Penelitian: Kabupaten Bone Balango	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan.	Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Volume. 3, Nomor. 2, Mei 2025

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Devie Triana Sari, Nur Isroatul Husna, dan Fajar Wulandari (2023) “Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah: Faktor Pendidikan, Sosial-ekonomi, Lokasi, IPM”	Variabel y: Kemiskinan Variabel x: IPM Lokasi Penelitian: Jawa Tengah	Variabel x: Pengangguran - Angka Putus Sekolah - Jarak ke pusat kota - PDRB - Inflasi Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel pengangguran, diikuti PDRB, IPM, inflasi, angka putus sekolah dan terakhir jarak ke pusat k ota berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.	Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia Volume 8 No 1 Januari 2023 Page 37-50 p- ISSN: 2477- 6254 e-ISSN: 2477-8427
6.	Ni'am Al Mumtaz, Yogi Supriyono (2023) “Problem kemiskinan di jawa tengah dalam perspektif zakat dan belanja bantuan sosial”	Variabel y: Kemiskinan Variabel x: Belanja Sosial Lokasi Penelitian: Jawa Tengah	Variabel x: Pendapatan Perkapita - Zakat Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda	Belanja bantuan sosial berpengaruh negatif tidak signifikan, pendapatan perkapita berpengaruh negatif signifikan, zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kemis kinan.	Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies, 4(1), 2023,1-10

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Iqbal Tawakal, M.Makmun Effendi, Annisa Maulana Majid (2025) “Analisis Tingkat Kemiskinan Dengan Algoritma K- Means Menggunakan Rapidminer di Tingkat Kota Kabupaten di Jawa Tengah”	Variabel y: Kemiskinan Variabel x: Belanja Sosial Lokasi Penelitian: Jawa Tengah	Variabel x: - Penganggur an - Akses air bersih - Sanitasi Metode Penelitian: Algoritma Clustering/Pemet aan spasial	Pola distribusi kemiskinan yang signifikan di Jawa Tengah, yang ditunjukkan oleh algoritma K-Means yang digunakan dengan RapidMiner untuk menganalisis tingkat kemiskinan.	Journal of Information System Management (JOISM) Vol. 7, No. 1 (2025)
8.	Bima Syahrul, Nur Faizin, Yesi Indriani, Edy Widodo (2023) "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi DIY Tahun 2019- 2021 Menggunakan Regresi Data Panel”	Variabel y: Kemiskinan Variabel x: IPM Metode Penelitian: Data Panel	Variabel x: - Penganggur an - Pengeluaran per kapita Lokasi penelitian: Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengeluaran per kapita (berpengaruh negatif) dan IPM (berpengaruh positif), sementara 6,76% dipengaruhi faktor lain di luar mo del.	Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika Vol. 13 No.2 (2023)

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Eki Arianto & Hendry Cahyono (2025) “The Effect Of Human Development Index and Unemployment On Poverty in Indonesia 2018- 2023”	Variabel y: Kemiskinan Variabel x: IPM Metode Penelitian: Data Panel	Variabel x: Pengangguran Lokasi Penelitian: Nasional Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda	IPM berpengaruh negatif dan signifikan sebaliknya, tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.	International Journal Of Management Finance Vol. 2, No. 4 June 2025, Page. 59- 64 P-ISSN 3026-6734 E- ISSN 3026- 6742
10.	Farhah Fauziah, Junaidi, Sultan (2024) “Analysis Of The Effect Of Social Assistance And Capital Expenditure On Poverty”	Variabel y: Kemiskinan Variabel x: Belanja Sosial	Variabel x: Belanja Modal Lokasi Penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda	Belanja sosial dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.	Jurnal Ekonomi Vol. 20, No. 1, January 2024, hlm. 01-13 ISSN 2502- 9525

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Mike Apriyanti & Lela Rospida (2025) “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2014- 2023”	Variabel y: Kemiskinan Variabel x: IPM	Variabel x: - Indeks Gini - Pertumbuha n Ekonomi Lokasi Penelitian: Nasional Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda	IPM menurunkan kemiskinan, Indeks Gini meningkatkan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan.	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 8 No. 2, 2025
12.	Sukma Dewi, Amir Arham, Bobby Rontow (2024) “Analisis Ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pilar Kemiskinan Di Kab/Kota Kawasan Teluk Tomini”	Variabel y: Kemiskinan Variabel x: TPT Metode Penelitian: Data Panel	Variabel x: - PDRB Sektor Pertanian - RLS Lokasi Penelitian: Kab/Kota Kawasan Teluk Tomini	TPT berpengaruh positif signifikan pada ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan poin kemiskinan.	Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan (JSEP) E-ISSN 3021-8063 JSEP: Vol 1. No 3, 2024

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Muhammad Fahmi & Banatul Hayati (2024) “Pengaruh Human Capital Terhadap Tingkat Kemiskinan di 13 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2022”	Variabel y: Kemiskinan Variabel x: TPT Lokasi Penelitian: Provinsi Jawa Tengah Metode Penelitian: Data Panel	Variabel x: - AHH - RLS - PDRB	Variabel AHH & RLS berpengaruh negatif dan signifikan, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan sedangkan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di 13 Kab Jawa Tengah	Diponegoro Journal of Economics Vol. 13, No. 1 (2024) 1-13 e-ISSN 2963-1688, p-ISSN 2337-3814
14.	Reza Dwi, Fivien, Moh Adenan (2024) “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Dependency Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”	Variabel y: Kemiskinan Variabel x: IPM Metode Penelitian: Data Panel	Variabel x: - Pertumbuhan Ekonomi - Dependency Ratio Lokasi Penelitian: Nasional	Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan, IPM berpengaruh negatif signifikan dan Dependency Ratio berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan.	Jurnal Ekuilibrium Vol VIII No. 1 (2024) ISSN: 2548-8945 E-ISSN: 2722-211X

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Haris Zirtana, Muhammad Baiquni, Sudrajat (2025) "Pengaruh Ketimpangan Sosial Ekonomi terhadap Kemiskinan di Daerah Tertinggal Indonesia: Analisis Data Panel 2015- 2021"	Variabel y: Kemiskinan Metode Penelitian: Data Panel	Variabel x: - RLS, AHH - Gap gender melek huruf - Angka kesakitan - Angka beban ketergantun gan - Presentase penduduk miskin pekerja informal - PDRB - Indikator rasio gini pendapatan Lokasi Penelitian: Di Daerah Tertinggal Indonesia	Ketimpangan pendidikan, persentase penduduk miskin pekerja informal, dan PDRB per kapita berpengaruh positif, sedangkan angka harapan hidup, ketimpangan pendapatan, dan angka beban ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.	Jurnal Masalah- Masalah Sosial Volume 16 No 1, June 2025 ISSN: 2614- 5863

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang diteliti serta menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang dibahas dalam tinjauan pustaka.

2.2.1 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Kemiskinan

Menurut teori pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan adanya perbedaan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan peluang kerja yang ada dalam perekonomian. Perbedaan ini mengakibatkan beberapa orang tidak

mampu mendapatkan pendapatan, sehingga mengakibatkan penurunan daya beli di kalangan rumah tangga dan meningkatkan risiko terjerumus ke dalam kemiskinan. Dari sudut pandang makroekonomi, laju pengangguran yang meningkat bisa menurunkan aktivitas produksi serta konsumsi secara keseluruhan, yang pada akhirnya mengakibatkan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi dan memperburuk keadaan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, teori ini menunjukkan bahwa semakin tinggi angka pengangguran, semakin besar kemungkinan terjadi peningkatan tingkat kemiskinan akibat hilangnya pendapatan, terbatasnya akses ke pekerjaan yang baik, dan melemahnya stabilitas ekonomi pada tingkat rumah tangga (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018).

Penelitian sebelumnya mengindikasikan adanya perbedaan dalam temuan mengenai dampak tingkat pengangguran terbuka terhadap kondisi kemiskinan. Penelitian Handayani (2023) menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa ketika tingkat pengangguran meningkat, jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan juga akan bertambah. Namun, penelitian Wibowo & Ridha (2021) yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tidak memberikan dampak signifikan terhadap kemiskinan di empat provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efek pengangguran terhadap kemiskinan dapat sangat dipengaruhi oleh karakteristik daerah, kondisi ekonomi setempat, serta keberadaan sektor informal dan program bantuan sosial yang dapat mengurangi dampak kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh pengangguran.

2.2.2 Hubungan Belanja Sosial dengan Kemiskinan

Menurut teori redistribusi pendapatan, pemerintah berperan krusial dalam mendistribusikan sumber daya secara adil untuk mengurangi ketimpangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, belanja sosial dianggap sebagai alat kebijakan fiskal yang bertujuan mengatasi ketidakseimbangan pendapatan melalui penyediaan bantuan langsung, subsidi, jaminan sosial, dan berbagai program perlindungan sosial lainnya. Dengan peningkatan pengeluaran sosial, diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi bagi rumah tangga dengan pendapatan rendah, meningkatkan daya beli mereka, serta memberikan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, teori ini menekankan bahwa semakin besar dan efisien pengeluaran sosial yang disediakan oleh pemerintah, semakin tinggi pula kemungkinan penurunan tingkat kemiskinan melalui cara peningkatan kapasitas ekonomi keluarga miskin dan perlindungan dari risiko kerentanan (Sarjito, 2023).

Penelitian terdahulu mengenai dampak belanja sosial dalam mengurangi kemiskinan menunjukkan perbedaan yang mencolok. Penelitian yang dilakukan oleh Samuda dan Suprihartiningsih (2023) menemukan bahwa program bantuan sosial terkait COVID-19 efektif dalam mencegah rumah tangga terjebak dalam kemiskinan selama pandemi, yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan dari belanja sosial terhadap peningkatan taraf hidup kelompok rentan. Namun, penelitian Sari et al., (2025) memperlihatkan bahwa distribusi bantuan sosial tidak memberikan efek signifikan pada pengurangan kemiskinan. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa rendahnya efektivitas ini dipengaruhi oleh masalah

penargetan, kebocoran dalam program, serta kekurangan dalam pelaksanaan di tingkat lokal. Penemuan yang bertentangan ini menegaskan bahwa hasil dari kebijakan belanja sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen, ketepatan dalam penentuan sasaran, dan keadaan sosial-ekonomi di kawasan yang menjadi tujuan bantuan.

2.2.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan

Menurut teori pembangunan manusia, perkembangan suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, namun juga oleh peningkatan kapasitas mendasar manusia yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan tingkat hidup yang layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai indikator menyeluruh yang menunjukkan tingkat pencapaian suatu daerah dalam ketiga aspek tersebut, sehingga menjadi ukuran yang krusial untuk memahami seberapa baik masyarakat dapat memanfaatkan peluang ekonomi dan meningkatkan taraf hidup. Kenaikan IPM mencerminkan mutu sumber daya manusia yang lebih tinggi, yang berpengaruh langsung pada peningkatan produktivitas, kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, serta penguatan ketahanan ekonomi bagi rumah tangga. Jadi, dalam pandangan teoritis, IPM memiliki hubungan terbalik dengan kemiskinan: semakin tinggi tingkat pembangunan manusia, semakin kecil kemungkinan sebuah rumah tangga terjebak dalam kemiskinan, karena akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan penghasilan yang cukup menjadi dasar penting dalam mengurangi ketidakstabilan ekonomi (Wardani et al., 2023).

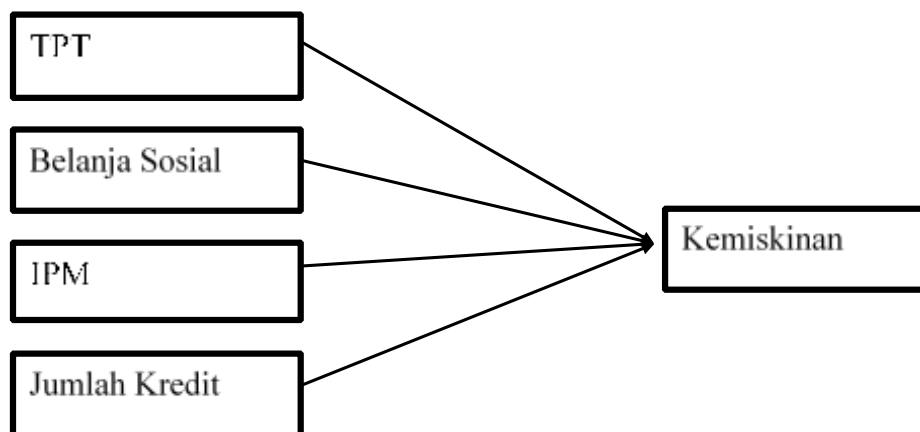
Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Wibowo (2024) mengindikasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di setiap provinsi di Indonesia, sehingga peningkatan dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup terbukti efektif dalam mengurangi jumlah penduduk yang miskin. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Wulandari et al., (2022) yang menegaskan bahwa perbaikan dalam sektor Kesehatan yang merupakan salah satu elemen kunci IPM secara signifikan meningkatkan nilai IPM di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan tingginya kemiskinan justru menghambat pencapaian pembangunan manusia. Kedua penelitian ini dengan konsisten memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas individu merupakan faktor krusial dalam menanggulangi kemiskinan, sementara tingginya angka kemiskinan dapat menjadi penghalang bagi kemajuan pembangunan manusia.

2.2.4 Hubungan Jumlah Kredit dengan Kemiskinan

Menurut teori *financial deepening*, terjadi proses ini ketika masyarakat dapat mengakses layanan keuangan termasuk kredit dengan lebih luas, mudah, dan efisien. Penjelasan ini menekankan bahwa peningkatan penyediaan kredit oleh lembaga keuangan dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui penyediaan modal, perluasan usaha, peningkatan konsumsi produktif, serta penciptaan peluang kerja baru. Dalam konteks pengurangan kemiskinan, kredit berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi bagi rumah tangga dengan pendapatan rendah, mengurangi kerentanan mereka terhadap guncangan ekonomi, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan usaha mikro atau kegiatan produktif

lainnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang teori, jumlah kredit dianggap memiliki kaitan negatif dengan tingkat kemiskinan, semakin besar jumlah kredit yang diberikan, semakin rendah angka kemiskinan, asalkan penyediaan kredit tersebut dilakukan secara inklusif, tepat sasaran, dan diinvestasikan untuk tujuan yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi (Wardana et al., 2023).

Penelitian Laksmi & Soseco (2024) menunjukkan bahwa penyaluran jumlah kredit belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, yang menunjukkan adanya rendahnya efisiensi dalam distribusi kredit dan masih terbatasnya akses terhadap pembiayaan produktif bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. Temuan ini berbeda dengan Iztiyar (2022), yang menunjukkan bahwa KUR justru berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM melalui peningkatan kapasitas usaha, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan output, sehingga turut membantu menurunkan kemiskinan. Perbedaan ini menegaskan bahwa efektivitas kredit dalam mengurangi kemiskinan sangat bergantung pada desain program, kualitas penyaluran, dan pemanfaatannya pada kegiatan yang benar-benar produktif.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah perkiraan sementara yang diajukan dalam suatu penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif sedangkan belanja sosial, indeks pembangunan manusia, dan jumlah kredit berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024.
2. Diduga secara bersama-sama tingkat pengangguran terbuka, belanja sosial, indeks pembangunan manusia, dan jumlah kredit berpengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024.